

BPP
BADAN PENGARAH P

LAPORAN BULANAN

JUNI 2026



Badan Pengarah Papua
Provinsi Papua



RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama bulan Juni 2026, Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua melalui Anggota Badan dan Kelompok Kerja (Pokja) telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam rangka pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) guna mendukung percepatan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua, penyelesaian permasalahan pertanahan, serta penguatan koordinasi lintas sektor dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat adat.

Pelaksanaan kegiatan selama bulan Juni 2026 berjalan dengan baik dan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang memerlukan tindak lanjut secara berkelanjutan. BPP terus mengawal pelaksanaan program prioritas melalui peran sebagai fasilitator, koordinator, dan penghubung antar pemangku kepentingan guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.



ALBERTH YOKU, S.Ag
Anggota BPP RI Provinsi Papua



DAFTAR ISI

Cover		1
Ringkasan Eklusif		2
Daftar Isi		3
Kegiatan Anggota BPP		5
Kegiatan Pokja Papua Polhukam		15
Kegiatan Pokja Papua Produktif		21
Kegiatan Pokja Papua Cerdas		30
Kegiatan Pokja Papua Sehat		41
Kesimpulan		43
Penutup		44



JUNI 2026



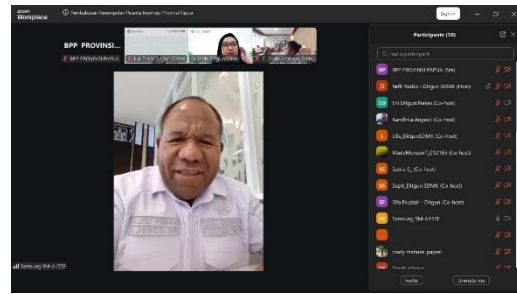
1. Kegiatan Strategis

Anggota Badan dan Kelompok Kerja (Pokja) Badan Pengarah Papua (BPP) / Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) telah melaksanakan kegiatan strategis sebagai berikut:

Anggota BPP/BP3OKP Provinsi Papua

No	Kegiatan Strategis	Tanggal	Tujuan	Hasil	Dokumentasi
1.	Koordinasi Penguatan Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Persawahan di Distrik Arso, Kabupaten Keerom.	2 Juni 2026	Mendukung penguatan ketahanan pangan di Tanah Papua melalui optimalisasi pemanfaatan lahan adat menjadi kawasan persawahan produktif di Distrik Arso, Kabupaten Keerom, peningkatan kapasitas petani, serta penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan di Tanah Papua.	BP3OKP Provinsi Papua melaksanakan kunjungan lapangan dan dialog bersama petani serta tokoh adat dalam rangka pemetaan potensi dan persiapan pemanfaatan lahan adat seluas 250 hektar untuk pengembangan kawasan persawahan produktif. Kegiatan ini menghasilkan dukungan dan komitmen awal dari para pemangku kepentingan untuk meningkatkan luas tanam dan produksi pangan lokal, memperkuat pembinaan dan pendampingan petani secara berkelanjutan, serta mengembangkan sentra produksi beras lokal guna mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar Papua. Selain itu, pengembangan kawasan persawahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan kemandirian ekonomi Orang Asli Papua dalam sektor pertanian.	 

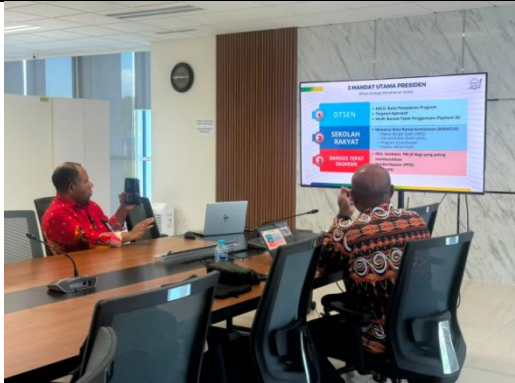


2.	Rapat Koordinasi Penempatan Peserta Internship Dokter Wilayah Papua (zoom).	3 Juni 2026	1. Menindaklanjuti permohonan audiensi dokter internship 2. Tindaklanjuti rekomendasi penempatan ulang dokter internship periode mei 2026 ke Periode Agustus 2026	1. Disetujui untuk diproses di Tingkat kementerian 2. Akan diberikan informasi terkait perkembangannya 3. Koordinasikan dengan UNIPA dan UNCEN terkait Data Dokter Internship Periode Agustus 2026	
3.	Koordinasi Status dan Legalitas Lahan Pengembangan Kawasan Persawahan 250 Hektare di Distrik Arso.	3 Juni 2026	Mendukung pengembangan kawasan persawahan seluas 250 hektar di Distrik Arso, Kabupaten Keerom, melalui koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memperoleh kepastian status dan legalitas lahan, serta memastikan pemanfaatan lahan adat dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hak-hak masyarakat adat.	BP3OKP Provinsi Papua melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait status hukum dan legalitas lahan yang direncanakan untuk pengembangan kawasan persawahan seluas 250 hektar. Dalam pertemuan tersebut dibahas mekanisme verifikasi dan pemetaan lahan, identifikasi status hak atas tanah, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi potensi sengketa atau tumpang tindih hak atas tanah. Selain itu, diperoleh masukan mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat pemilik hak ulayat dalam setiap tahapan pengembangan kawasan pertanian guna menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan program.	



4.	Koordinasi Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat pada Kawasan Bandara Stevanus Rumbewas dan PT Pertamina Yapen.	9 s.d. 13 Juni 2026	Melaksanakan koordinasi dan verifikasi lapangan terhadap permasalahan tanah ulayat pada kawasan Bandara Stevanus Rumbewas dan PT Pertamina (Persero) Depot Yapen, serta menghimpun aspirasi masyarakat adat dan para pihak terkait sebagai dasar penyelesaian sengketa.	Diperoleh informasi mengenai perbedaan klaim kepemilikan tanah, mekanisme pelepasan hak, dan pembayaran ganti rugi. Hasil koordinasi dengan masyarakat adat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, ATR/BPN, Polres, dan PT Pertamina menunjukkan perlunya verifikasi dokumen pertanahan serta penyelesaian melalui mekanisme mediasi terpadu.	
5.	Rapat Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Eliminasi Malaria.	12 Juni 2026	Menyusun masukan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka mendukung percepatan eliminasi malaria di wilayah Papua.	Dihimpun masukan dari kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Eliminasi Malaria.	
6.	Rapat Koordinasi Pengembangan Koperasi Orang Asli Papua bersama Bank Papua.	12 Juni 2026	Rencana Investasi Percepatan Repalnting Sawit di Kabupaten Keerom	Memaparkan Rencana Investasi Program Sawit Rakyat di Kabupaten Keerom, dalam rangka dukungan kerjasama dan menggandeng Bank Papua sebagai Bank Penyalur Dana PSR di Provinsi Papua	



7.	Rapat Koordinasi bersama Balai Kementerian Sosial mengenai Program Prioritas Tahun 2026.	12 Juni 2026	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program prioritas Kementerian Sosial di Provinsi Papua serta mengidentifikasi peluang dukungan BPP dalam implementasinya.	Kepala Balai Kementerian Sosial memaparkan program prioritas Tahun 2026, antara lain percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, penanganan kedaruratan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai juga meminta dukungan Badan Pengarah Papua untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan lahan yang dihadapi dalam pembangunan Sekolah Rakyat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.	
8.	Pembahasan Lanjutan Permasalahan Akademik Mahasiswa FK UNCEN.	15 Juni 2026	Memberikan Informasi Lanjutan Koordinasi dengan Pihak Rektorat Uncen dan FK UNCEN	Masih menunggu Informasi Lanjutan dari Pihak UNCEN	
9.	Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat PT Pertamina Depot Yapen.	18 Juni 2026	Menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Pokja POLHUKAM BPP di Kabupaten Kepulauan Yapen melalui koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) Regional Papua Maluku guna memperoleh kejelasan mengenai dasar hukum penggunaan tanah ulayat dan dokumen pertanahan	PT Pertamina Regional Papua Maluku menjelaskan riwayat penggunaan lahan, status Hak Guna Bangunan (HGB) yang masih berlaku hingga tahun 2044, serta menyatakan kesiapan membuka dokumen historis penggunaan tanah sebagai bahan klarifikasi. Pertemuan juga mengidentifikasi perlunya verifikasi lanjutan terhadap dokumen pelepasan hak dan administrasi pertanahan.	



			pada lokasi PT Pertamina Depot Yapen.		
10	Audiensi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Akademik Mahasiswa OAP FK UNCEN Angkatan 2017–2018.	18 Juni 2026	Tujuan pertemuan ini menemukan jalan tengah dari permasalahan mahasiswa fakultas kedokteran Angkatan 2017, 2018 & 2019 yang terancam <i>drop out</i> .	Hasil pertemuan ini ialah pihak BPP akan menyurat kepada kementerian terkait agar dapat memberikan kebijakan khusus bagi mahasiswa terdaftar yang terancam <i>drop out</i> .	
11	Audiensi Penyampaian Hasil Pembahasan Permasalahan Mahasiswa FK UNCEN.	19 Juni 2026	Menyampaikan Hasil Pertemuan Pertama dengan Pihak UNCEN	1. Inputan Mahasiswa terkait adanya Praktik Tidak berkenan oleh pihak Dekanat dengan Proses Yudisium Pihak UNCEN Tidak Hadir	
12	Partisipasi pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua Tahun 2026.	22 Juni 2026	Menghadiri kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua Tahun 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah di Tanah Papua.	Mengikuti penyampaian capaian kinerja, praktik baik (best practices), dan inovasi pemerintah daerah di wilayah Papua sebagai bahan pembelajaran serta penguatan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.	



13	Penguksuhan dan Pembekalan Kelompok Kerja Rekrutmen Tahun 2026.	22 Juni 2026	Mengikuti kegiatan penguksuhan dan pembekalan Kelompok Kerja Rekrutmen Tahun 2026 guna memperkuat pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan mekanisme pelaksanaan rekrutmen sesuai ketentuan yang berlaku.	Kelompok Kerja Rekrutmen Tahun 2026 resmi dikukuhkan dan memperoleh pembekalan mengenai tugas, tanggung jawab, tata kelola, serta mekanisme pelaksanaan rekrutmen guna mendukung proses seleksi yang transparan, objektif, dan akuntabel.	
14	Forum Konsultasi Publik Tahun 2026.	23 Juni 2026	Menghimpun masukan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan serta program prioritas Tahun 2026.	Terhimpun berbagai masukan dan aspirasi yang akan menjadi bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Papua.	
15	Rapat Pembahasan Proposal Penyelenggaraan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026.	26 Juni 2026	Kita membahas Proposal yang telah di kirimkan dan coba untuk memberikan Reviu Kembali ke Balai Bahasa Prov Papua	Ada beberapa pembiayaan yang perlu konfirmasi	



16	Pertemuan dengan Pihak Bank BNI Wilayah Jayapura.	23 Juni 2026	Tujuan pertemuan ini adalah sebagai bentuk Kerjasama dalam mensukseskan program PSR	Hasil pembahasan adalah tercapainya komitmen Kerjasama antara pihak bank BNI dan juga pihak BPP dalam mendukung terlaksananya program Peremajaan Sawit Rakyat.	
17	Rapat Koordinasi Persiapan Kongres Bahasa Daerah bersama Balai Bahasa Provinsi Papua.	29 Juni 2026	Pembahasan Reviu BPP terkait Proposal dan Koordinasi dengan PUSBANGLIN BADAN BAHASA	BPP menyiapkan Skema Panitia Daerah untuk mengerjakan Persiapan dan pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah Ke I Se-Indonesia	
18	Rapat Dengar Pendapat Pengusaha Jasa Konstruksi Orang Asli Papua Wilayah Adat Tabi dan Saireri.	30 Juni 2026	Menjaring aspirasi dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengusaha jasa konstruksi Orang Asli Papua (OAP), serta memperkuat koordinasi dalam rangka pemberdayaan dan implementasi kebijakan afirmasi di sektor jasa konstruksi.	Pengusaha jasa konstruksi OAP menyampaikan berbagai kendala, antara lain terbatasnya keterlibatan dalam proyek pemerintah dan BUMN, hambatan pemenuhan persyaratan Sertifikat Badan Usaha (SBU), serta minimnya akses komunikasi dengan instansi pelaksana pembangunan. BP3OKP berkomitmen memfasilitasi koordinasi dengan BPJN, BWS, dan instansi terkait guna memperkuat pelibatan pengusaha OAP dalam pembangunan.	



19	Rapat Koordinasi Persiapan Kongres Bahasa Daerah bersama Balai Bahasa Provinsi Papua.	30 Juni 2026	BPP memaparkan Susunan Panitia Daerah agar segera di tindaklanjuti PUSBANGLIN BADAN BAHASA	Susunan telah dikirimkan ke PUSBANGLIN BADAN BAHASA	
----	---	--------------	---	--	---



Rekomendasi Kegiatan Anggota BPP/BP3OKP Provinsi Papua

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	Koordinasi Penguatan Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Persawahan di Distrik Arso, Kabupaten Keerom.	Perlu dilakukan percepatan penyusunan dan implementasi rencana pengembangan lahan sawah seluas 250 hektar melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Keerom, Bappeda, Badan Pertanahan Nasional, serta lembaga adat dan masyarakat pemilik hak ulayat. Dukungan yang diperlukan meliputi penyelesaian aspek legalitas lahan, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi serta jalan usaha tani, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, pendampingan dan peningkatan kapasitas petani, serta penguatan akses pemasaran hasil pertanian guna mendukung terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan Papua secara berkelanjutan.
2.	Rapat Koordinasi Penempatan Peserta Internship Dokter Wilayah Papua (zoom).	Memperkuat Koordinasi Lintas Sektor untuk mempersiapkan wahana dan Dokter Internship
3.	Koordinasi Status dan Legalitas Lahan Pengembangan Kawasan Persawahan 250 Hektare di Distrik Arso.	Perlu dilakukan tindak lanjut berupa inventarisasi, verifikasi, dan pemetaan status lahan oleh BPN bersama Pemerintah Daerah, lembaga adat, dan masyarakat pemilik hak ulayat guna memastikan kepastian hukum atas lahan yang akan dikembangkan. Hasil verifikasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan kawasan persawahan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pelaksanaan program ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Keerom.
4.	Koordinasi Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat pada Kawasan Bandara Stevanus Rumbewas dan PT Pertamina Yapen.	Memfasilitasi forum mediasi antara masyarakat adat, Pemerintah Daerah, ATR/BPN, dan PT Pertamina; mendorong verifikasi legalitas dokumen pertanahan dan pelepasan hak; serta mengawal penyelesaian ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Rapat Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Eliminasi Malaria.	Perlu mendorong percepatan penetapan Instruksi Presiden tentang Eliminasi Malaria disertai penguatan sinergi lintas sektor dan dukungan pendanaan di wilayah Papua.
6.	Rapat Koordinasi Pengembangan Koperasi Orang Asli Papua bersama Bank Papua.	• Mendorong Bank Papua sebagai Bank Pelaksana, bermitra dengan BPP Papua yang membawahi Koperasi OMP sebagai Koperasi Pengusul Kegiatan PSR Sawit di Kab. Keerom. • Menyampaikan Rancangan Investasi Sawit terkait kegiatan PSR Keerom, untuk selanjutnya mendapat pertimbangan dari Bank Papua sebagai Bank Pelaksana.
7.	Rapat Koordinasi bersama Balai Kementerian Sosial mengenai Program Prioritas Tahun 2026.	Badan Pengarah Papua perlu memfasilitasi koordinasi lintas instansi bersama Pemerintah Daerah, ATR/BPN, Balai Kementerian Sosial, dan pemangku kepentingan terkait guna



Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
GKN Lantai 4 Jl. Ahmad Yani Jayapura Papua

		mempercepat penyelesaian permasalahan lahan sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai rencana.
8.	Pembahasan Lanjutan Permasalahan Akademik Mahasiswa FK UNCEN.	Mempersiapkan Pertemuan dengan Pihak Uncen
9.	Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat PT Pertamina Depot Yapen.	BPP melalui Pokja POLHUKAM memfasilitasi koordinasi lanjutan antara PT Pertamina, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, ATR/BPN, dan masyarakat adat untuk melakukan verifikasi dokumen, memperkuat proses mediasi, serta mendorong penyelesaian sengketa tanah ulayat secara transparan, berkeadilan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.	Audiensi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Akademik Mahasiswa OAP FK UNCEN Angkatan 2017–2018.	Menyiapkan Koordinasi dengan Pihak Uncen secara teknis untuk menyelesaikan permasalahan
11.	Audiensi Penyampaian Hasil Pembahasan Permasalahan Mahasiswa FK UNCEN.	Menyiapkan Koordinasi dengan Pihak Uncen secara teknis untuk menyelesaikan permasalahan
12.	Partisipasi pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua Tahun 2026.	Mendorong replikasi praktik-praktik terbaik yang relevan serta memperkuat koordinasi antara Badan Pengarah Papua, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
13.	Penguatan dan Pembekalan Kelompok Kerja Rekrutmen Tahun 2026.	Memperkuat koordinasi antaranggota Pokja baru serta meningkatkan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.
14.	Forum Konsultasi Publik Tahun 2026.	Masukan dari Forum Konsultasi Publik perlu diakomodasi dalam penyusunan program dan kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua.
15.	Rapat Pembahasan Proposal Penyelenggaraan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026.	Menyiapkan Koordinasi dengan Pihak Uncen secara teknis untuk menyelesaikan permasalahan
16.	Pertemuan dengan Pihak Bank BNI Wilayah Jayapura	Menjaga komitmen Kerjasama dalam menyelesaikan program PSR di Kab. Keerom.
17.	Rapat Koordinasi Persiapan Kongres Bahasa Daerah bersama Balai Bahasa Provinsi Papua.	Menyiapkan Skema Panitia Daerah
18.	Rapat Dengar Pendapat Pengusaha Jasa Konstruksi Orang Asli Papua Wilayah Adat Tabi dan Saireri.	Memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait untuk memperkuat implementasi kebijakan afirmasi, meningkatkan akses pengusaha OAP terhadap proyek pembangunan, serta mendukung pembinaan kapasitas dan penguatan administrasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.	Rapat Koordinasi Persiapan Kongres Bahasa Daerah bersama Balai Bahasa Provinsi Papua.	Skema Panitia Daerah perlu Legitimasi PUSBANGLIN BADAN BAHASA

POKJA PAPUA POLHUKAM



JUNI 2026

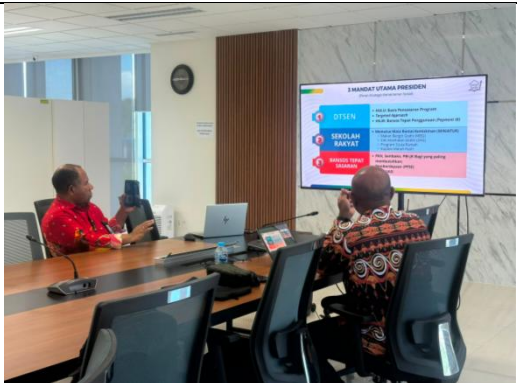
Badan Pengarah Papua
Perwakilan Provinsi Papua



PELAKSANAAN KEGIATAN KELOMPOK KERJA POLHUKAM BPP/BP3OKP PROVINSI PAPUA PADA BULAN JUNI 2026

No	Kegiatan Strategis	Tanggal	Tujuan	Hasil	Dokumentasi
1.	Koordinasi Penguatan Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Persawahan di Distrik Arso, Kabupaten Keerom.	2 Juni 2026	Mendukung percepatan pengembangan kawasan persawahan melalui penguatan aspek legalitas lahan dan koordinasi dengan masyarakat pemilik hak ulayat guna mendukung ketahanan pangan di Papua.	• Teridentifikasi kebutuhan penyelesaian legalitas lahan adat. • Diperoleh masukan mengenai pentingnya pelibatan masyarakat pemilik hak ulayat. • Memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pengembangan kawasan persawahan.	 



2.	Rapat Koordinasi bersama Bupati, Pj SEKDA, Asisten 1 dan Staf Ahli Kabupaten Yapen untuk Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat pada Kawasan Bandara Stevanus Rumbewas dan PT Pertamina Yapen	9 s.d. 13 Juni 2026	Melaksanakan koordinasi dan verifikasi lapangan terhadap permasalahan tanah ulayat pada kawasan Bandara Stevanus Rumbewas dan PT Pertamina (Persero) Depot Yapen, serta menghimpun aspirasi masyarakat adat dan para pihak terkait sebagai dasar penyelesaian sengketa.	- Menghimpun aspirasi masyarakat adat terkait sengketa tanah ulayat. - Teridentifikasi perbedaan klaim kepemilikan, pelepasan hak, dan pembayaran ganti rugi. - Dilaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, ATR/BPN, Polres, dan PT Pertamina. - Diperoleh kesepakatan mengenai perlunya verifikasi dokumen dan mediasi terpadu.	
3.	Rapat Koordinasi bersama Balai Kementerian Sosial mengenai Program Prioritas Tahun 2026	12 Juni 2026	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program prioritas Kementerian Sosial di Provinsi Papua serta mengidentifikasi peluang dukungan BPP dalam implementasinya.	- Dipaparkan program prioritas Tahun 2026, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat. - Teridentifikasi kendala penyelesaian lahan pembangunan Sekolah Rakyat. - Balai Kementerian Sosial meminta dukungan BPP dalam koordinasi lintas instansi untuk penyelesaian lahan.	
4.	Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat PT Pertamina Depot Yapen dengan Pihak Pertamina Region Papua dan Maluku di Jayapura,	18 Juni 2026	Menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Pokja POLHUKAM BPP di Kabupaten Kepulauan Yapen melalui koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) Regional Papua Maluku guna memperoleh kejelasan mengenai dasar hukum penggunaan tanah ulayat dan dokumen pertanahan pada lokasi PT Pertamina Depot Yapen.	- PT Pertamina menjelaskan riwayat penggunaan lahan dan status HGB hingga tahun 2044. - PT Pertamina menyatakan kesiapan membuka dokumen historis penggunaan tanah. - Teridentifikasi perlunya verifikasi lanjutan terhadap dokumen pelepasan hak dan administrasi pertanahan. - Menguatkan komitmen penyelesaian sengketa melalui proses klarifikasi bersama.	



5	Penguatan dan Pembekalan Kelompok Kerja Rekrutmen Tahun 2026_ Anggota BPP	22 Juni 2026	Penguatan anggota baru Pokja Polhukam BPP Provinsi Papua dan pembekalan guna memperkuat pemahaman terhadap tugas dan fungsi.	• Kelompok Kerja Rekrutmen Tahun 2026 resmi dikukuhkan. • Anggota Pokja BPP memperoleh pembekalan mengenai tugas dan fungsi dalam bekerja di BPP.	
---	--	--------------	--	---	---



**REKOMENDASI KEGIATAN KELOMPOK KERJA POLHUKAM BPP/BP3OKP PROVINSI PAPUA
PADA BULAN JUNI 2026**

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	Koordinasi bersama Kanwil BPN/ATR Provinsi Papua untuk Penguatan Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Persawahan di Distrik Arso, Kabupaten Keerom.	Mendorong percepatan penyelesaian aspek legalitas lahan melalui koordinasi dengan ATR/BPN, pemerintah daerah, dan masyarakat adat agar pengembangan kawasan persawahan dapat berjalan sesuai ketentuan.
2.	Koordinasi Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat pada Kawasan Bandara Stevanus Rumbewas dan PT Pertamina Yapen	Memfasilitasi forum mediasi antara masyarakat adat, Pemerintah Daerah, ATR/BPN, dan PT Pertamina serta mengawal verifikasi dokumen pertanahan dan penyelesaian ganti rugi sesuai ketentuan.(terlaksana 18 Juni 2026).
3.	Rapat Koordinasi bersama Balai Kementerian Sosial mengenai Program Prioritas Tahun 2026.	Badan Pengarah Papua perlu memfasilitasi koordinasi lintas instansi bersama Pemerintah Daerah, ATR/BPN, Balai Kementerian Sosial, dan pemangku kepentingan terkait guna mempercepat penyelesaian permasalahan lahan sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai rencana.
4.	Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat PT Pertamina Depot Yapen	Memfasilitasi koordinasi lanjutan antara PT Pertamina, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, ATR/BPN, dan masyarakat adat untuk verifikasi dokumen serta memperkuat proses mediasi menuju penyelesaian sengketa yang transparan dan berkeadilan.
5.	Penguatan dan Pembekalan Kelompok Kerja Rekrutmen Tahun 2026.	Memperkuat koordinasi antara Anggota BPP dan Pokja baru serta meningkatkan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.



**KESIMPULAN KESELURUHAN KEGIATAN KELOMPOK KERJA POLHUKAM BPP/BP3OKP
PROVINSI PAPUA PADA BULAN JUNI 2026**

Selama bulan Juni 2026, Kelompok Kerja Politik, Hukum, dan Keamanan (Pokja POLHUKAM) Badan Pengarah Papua (BPP/BP3OKP) Provinsi Papua telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam rangka menjalankan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap penyelesaian isu-isu strategis yang berkaitan dengan kepastian hukum, penyelesaian sengketa tanah ulayat, dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional, serta penguatan kelembagaan Badan Pengarah Papua.

Fokus utama pelaksanaan kegiatan diarahkan pada penyelesaian sengketa tanah ulayat di kawasan Bandara Stevanus Rumbewas dan PT Pertamina (Persero) Depot Yapen melalui koordinasi lapangan, verifikasi data, penghimpunan aspirasi masyarakat adat, serta fasilitasi dialog dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, ATR/BPN, Kepolisian, dan PT Pertamina. Hasil kegiatan menunjukkan masih terdapat perbedaan pandangan mengenai status kepemilikan tanah, mekanisme pelepasan hak, serta penyelesaian ganti rugi, sehingga diperlukan penguatan koordinasi lintas instansi, verifikasi dokumen pertanahan, dan pelaksanaan mediasi secara terpadu untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak.

Sebagai tindak lanjut, Pokja POLHUKAM melaksanakan rapat koordinasi bersama PT Pertamina (Persero) Regional Papua Maluku guna memperoleh klarifikasi mengenai dasar hukum penggunaan lahan, status Hak Guna Bangunan (HGB), serta dokumen historis pertanahan. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen PT Pertamina untuk mendukung proses klarifikasi melalui penyampaian dokumen yang diperlukan sebagai dasar verifikasi bersama dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.

Dalam mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional, Pokja POLHUKAM turut melaksanakan koordinasi bersama Balai Kementerian Sosial terkait percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Papua. Hasil koordinasi mengidentifikasi bahwa penyelesaian aspek legalitas lahan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pembangunan, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, ATR/BPN, Kementerian Sosial, dan masyarakat adat agar program dapat terlaksana sesuai rencana.

Selain itu, melalui Pengukuhan dan Pembekalan Kelompok Kerja Rekrutmen Tahun 2026, telah dilakukan pengangkatan anggota Pokja POLHUKAM BPP Provinsi Papua yang baru, disertai pembekalan mengenai tugas, fungsi, dan mekanisme pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi internal, serta penguatan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam mendukung pelaksanaan fungsi SHEK secara optimal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan Pokja POLHUKAM selama bulan Juni 2026 menunjukkan bahwa percepatan penyelesaian berbagai isu strategis di Papua memerlukan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan, kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, serta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, badan usaha, dan masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan arahan Pemerintah Pusat, untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan, mendukung implementasi program prioritas nasional, memperkuat kelembagaan Badan Pengarah Papua, serta menjaga stabilitas hukum dan sosial sebagai landasan bagi percepatan pembangunan Papua yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

POKJA PAPUA PRODUKTIF



JUNI 2026

Badan Pengarah Papua
Perwakilan Provinsi Papua



PELAKSANAAN KEGIATAN KELOMPOK KERJA PAPUA PRODUKTIF BPP/BP3OKP PROVINSI PAPUA PADA BULAN JUNI 2026

No	Kegiatan Strategis	Tanggal	Tujuan	Hasil	Dokumentasi
1.	Koordinasi Penguatan Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Persawahan di Distrik Arso, Kabupaten Keerom.	2 Juni 2026	Mendukung penguatan ketahanan pangan di Tanah Papua melalui optimalisasi pemanfaatan lahan adat menjadi kawasan persawahan produktif di Distrik Arso, Kabupaten Keerom, peningkatan kapasitas petani, serta penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan di Tanah Papua.	• Terlaksananya kunjungan lapangan dan dialog bersama petani serta tokoh adat terkait pengembangan kawasan persawahan seluas 250 hektar. • Teridentifikasinya potensi lahan adat yang dapat dikembangkan menjadi kawasan persawahan produktif. • Terbangunnya komitmen awal para pemangku kepentingan untuk mendukung pengembangan sentra produksi beras lokal di Papua. • Menguatnya komitmen pembinaan dan pendampingan petani guna meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi Orang Asli Papua.	 



2.	Koordinasi Status dan Legalitas Lahan Pengembangan Kawasan Persawahan 250 Hektare di Distrik Arso.	3 Juni 2026	Mendukung pengembangan kawasan persawahan seluas 250 hektar di Distrik Arso, Kabupaten Keerom, melalui koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memperoleh kepastian status dan legalitas lahan, serta memastikan pemanfaatan lahan adat dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hak-hak masyarakat adat.	• Terlaksananya koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai status hukum dan legalitas lahan. • Dibahas mekanisme verifikasi, inventarisasi, dan pemetaan status hak atas tanah. • Teridentifikasinya langkah-langkah antisipasi terhadap potensi sengketa dan tumpang tindih hak atas tanah. • Diperolehnya masukan mengenai pentingnya pelibatan masyarakat pemilik hak ulayat dalam setiap tahapan pengembangan kawasan pertanian.	
----	--	-------------	--	--	---



3.	Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kab. Keerom	02 Juni 2026	Rencana Replanting Kebun kelapa Sawit Eks PT. PN II Arso Kab. Keerom melalui program Perejmaan Sawit Rakyat	Sebagai narasumber, menyampaikan materi terkait tugas Fungsi BPP dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Provinsi Papua dalam rangka mendukung Percepatan Pelaksanaan Program Replanting Sawit (PSR) di Provinsi Papua, Khususnya di Kab. Keerom Tahun 2026, sesuai target yang diberikan seluas 3000 Ha.	
4.	Rapat Koordinasi Pengembangan Koperasi Orang Asli Papua bersama Bank Papua.	12 Juni 2026	Rencana Investasi Percepatan Repalnting Sawit di Kabupaten Keerom	Memaparkan Rencana Investasi Program Sawit Rakyat di Kabupaten Keerom, dalam rangka dukungan kerjasama dan menggandeng Bank Papua sebagai Bank Penyalur Dana PSR di Provinsi Papua	 



5.	Rapat Koordinasi bersama Balai Kementerian Sosial mengenai Program Prioritas Tahun 2026.	12 Juni 2026	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program prioritas Kementerian Sosial di Provinsi Papua serta mengidentifikasi peluang dukungan BPP dalam implementasinya.	- Kepala Balai Kementerian Sosial memaparkan program prioritas Tahun 2026, meliputi pembangunan Sekolah Rakyat, penanganan kedaruratan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. - Teridentifikasinya permasalahan lahan sebagai kendala dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Papua. - Kepala Balai meminta dukungan Badan Pengarah Papua untuk memfasilitasi koordinasi lintas instansi dalam penyelesaian permasalahan lahan.	
6.	Pertemuan dengan Pihak Bank BNI Wilayah Jayapura.	23 Juni 2026	Memperkuat sinergi dan kerja sama antara Badan Pengarah Papua dengan Bank BNI dalam mendukung pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Keerom melalui dukungan pembiayaan dan koordinasi lintas pemangku kepentingan.	- Tercapainya komitmen kerja sama antara Badan Pengarah Papua dan Bank BNI dalam mendukung Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). - Menguatnya koordinasi dalam mendukung akses pembiayaan bagi pelaksanaan Program PSR. - Terbangunnya sinergi awal untuk mempercepat implementasi Program PSR di Kabupaten Keerom.	



	Rapat Dengar Pendapat Pengusaha Jasa Konstruksi Orang Asli Papua Wilayah Adat Tabi dan Saireri.	30 Juni 2026	Menjaring aspirasi dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengusaha jasa konstruksi Orang Asli Papua (OAP), serta memperkuat koordinasi dalam rangka pemberdayaan dan implementasi kebijakan afirmasi di sektor jasa konstruksi.	• Terhimpunnya aspirasi pengusaha jasa konstruksi OAP terkait keterbatasan akses terhadap proyek pemerintah dan BUMN. • Teridentifikasinya kendala pemenuhan persyaratan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan akses komunikasi dengan instansi pelaksana pembangunan. • BP3OKP berkomitmen memfasilitasi koordinasi dengan BPJN, BWS, dan instansi terkait guna memperkuat pelibatan pengusaha OAP dalam pembangunan.	
--	---	--------------	--	---	---



**REKOMENDASI KEGIATAN KELOMPOK KERJA PAPUA PRODUKTIF BPP/BP3OKP PROVINSI
PAPUA PADA BULAN JUNI 2026**

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	Koordinasi Penguatan Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Persawahan di Distrik Arso, Kabupaten Keerom.	Perlu dilakukan percepatan penyusunan dan implementasi rencana pengembangan lahan sawah seluas 250 hektar melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Keerom, Bappeda, Badan Pertanahan Nasional, serta lembaga adat dan masyarakat pemilik hak ulayat. Dukungan yang diperlukan meliputi penyelesaian aspek legalitas lahan, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi serta jalan usaha tani, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, pendampingan dan peningkatan kapasitas petani, serta penguatan akses pemasaran hasil pertanian guna mendukung terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan Papua secara berkelanjutan.
2.	Koordinasi Status dan Legalitas Lahan Pengembangan Kawasan Persawahan 250 Hektare di Distrik Arso.	Perlu dilakukan tindak lanjut berupa inventarisasi, verifikasi, dan pemetaan status lahan oleh BPN bersama Pemerintah Daerah, lembaga adat, dan masyarakat pemilik hak ulayat guna memastikan kepastian hukum atas lahan yang akan dikembangkan. Hasil verifikasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan rencana pengembangan kawasan persawahan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pelaksanaan program ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Keerom.
3.	Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Kab. Keerom	• Mempercepat penyelesaian dokumen administrasi Petani Peserta Program PSR Sawit di Kab. Keerom untuk di usulkan oleh Dinas Pertanian Kab. Keerom. • Melakukan sosialisasi pada petani yang sudah terdaftar agar segera melengkapi dokumen administrasinya, sehingga mempermudah penyerapan alokasi anggaran dari BPDP • Mendorong penyelesaian seritikasi lahan sebagai persyaratan utama, kerjasama antara DPW APKASINDO dan BPN Kab. Keerom.
4.	Rapat Koordinasi Pengembangan Koperasi Orang Asli Papua bersama Bank Papua.	• Mendorong Bank Papua sebagai Bank Pelaksana, bermitra dengan BPP Papua yang membawahi Koperasi OMP sebagai Koperasi Pengusul Kegiatan PSR Sawit di Kab. Keerom. • Menyampaikan Rancangan Investasi Sawit terkait kegiatan PSR Keerom, untuk selanjutnya mendapat pertimbangan dari Bank Papua sebagai Bank Pelaksana.
5.	Rapat Koordinasi bersama Balai Kementerian Sosial mengenai Program Prioritas Tahun 2026.	Badan Pengarah Papua perlu memfasilitasi koordinasi lintas instansi bersama Pemerintah Daerah, ATR/BPN, Balai Kementerian Sosial, dan pemangku kepentingan terkait guna mempercepat penyelesaian permasalahan lahan sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai rencana.
6.	Pertemuan dengan Pihak Bank BNI Wilayah Jayapura.	Menindaklanjuti komitmen kerja sama melalui koordinasi berkelanjutan antara Badan Pengarah Papua, Bank BNI, pemerintah daerah, dan



Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
GKN Lantai 4 Jl. Ahmad Yani Jayapura Papua

		pemangku kepentingan terkait guna mempercepat pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Keerom serta memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan.
7.	Rapat Dengar Pendapat Pengusaha Jasa Konstruksi Orang Asli Papua Wilayah Adat Tabi dan Saireri.	Memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait untuk memperkuat implementasi kebijakan afirmasi, meningkatkan akses pengusaha OAP terhadap proyek pembangunan, serta mendukung pembinaan kapasitas dan penguatan administrasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**KESIMPULAN KESELURUHAN KEGIATAN KELOMPOK KERJA PRODUKTIF BPP/BP3OKP
PROVINSI PAPUA PADA BULAN JUNI 2026:**

Selama bulan Juni 2026, pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Papua Produktif Badan Pengarah Papua Provinsi Papua secara umum berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana kerja. Adapun kesimpulan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal serta tugas pokok dan fungsi Kelompok Kerja Papua Produktif Badan Pengarah Papua Provinsi Papua.
2. Fokus utama kegiatan pada bulan Juni 2026 adalah mendorong percepatan pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Keerom sebagai bagian dari program strategis nasional, sekaligus memperkuat pengembangan komoditas kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Provinsi Papua.
3. Kelompok Kerja Papua Produktif terus mendorong keterlibatan sektor perbankan sebagai mitra pemerintah, koperasi, dan petani dalam mendukung akses pembiayaan serta penguatan kelembagaan koperasi. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas petani sehingga pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit dapat berlangsung secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
4. Kelompok Kerja Papua Produktif juga terus meningkatkan pelaksanaan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dengan para pemangku kepentingan, meliputi kementerian/lembaga, pemerintah daerah kabupaten/kota, dunia usaha, serta pihak swasta. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui sinergi lintas sektor.

POKJA PAPUA CERDAS

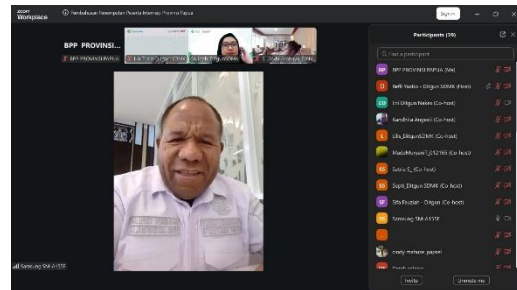
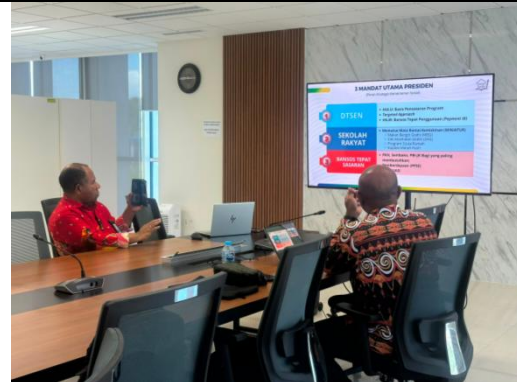


JUNI 2026

Badan Pengarah Papua
Perwakilan Provinsi Papua



PELAKSANAAN KEGIATAN KELOMPOK KERJA PAPUA CERDAS BPP/BP3OKP PROVINSI PAPUA PADA BULAN JUNI 2026

No	Kegiatan Strategis	Tanggal	Tujuan	Hasil	Dokumentasi
1.	Rapat Koordinasi Penempatan Peserta Internship Dokter Wilayah Papua (zoom).	3 Juni 2026	- Menindaklanjuti permohonan audiensi dokter internship - Tindaklanjuti rekomendasi penempatan ulang dokter internship periode mei 2026 ke Periode Agustus 2026	- Disetujui untuk diproses di Tingkat kemenkes - Akan diberikan informasi terkait perkembangan nya - Koordinasikan dengan UNIPA dan UNCEN terkait Data Dokter Internship Periode Agustus 2026	
2.	Rapat Koordinasi bersama Balai Kementerian Sosial mengenai Program Prioritas Tahun 2026.	12 Juni 2026	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Provinsi Papua, khususnya terkait kesiapan pembangunan sekolah, pemenuhan tenaga pendidik, serta dukungan Badan Pengarah Papua dalam implementasi program.	- Kepala Balai Kementerian Sosial memaparkan progres Program Sekolah Rakyat Tahun 2026 di Provinsi Papua. - Dibahas kebutuhan penyelesaian permasalahan lahan sebagai salah satu kendala pembangunan Sekolah Rakyat. - Disampaikan bahwa pemenuhan tenaga pendidik akan mendukung proses seleksi PPPK dengan mengutamakan Orang Asli Papua (OAP) dan putra-putri yang lahir dan besar di Papua sesuai kebutuhan Sekolah Rakyat. - Badan Pengarah Papua diminta mendukung koordinasi lintas instansi guna mempercepat pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.	



3.	Pembahasan Lanjutan Permasalahan Akademik Mahasiswa FK UNCEN.	15 Juni 2026	Memberikan Informasi Lanjutan Koordinasi dengan Pihak Rektorat Uncen dan FK UNCEN	Masih menunggu Informasi Lanjutan dari Pihak UNCEN	
4.	Audiensi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Akademik Mahasiswa OAP FK UNCEN Angkatan 2017–2018.	18 Juni 2026	Tujuan pertemuan ini menemukan jalan tengah dari permasalahan mahasiswa fakultas kedokteran Angkatan 2017, 2018 & 2019 yang terancam <i>drop out</i> .	Hasil pertemuan ini ialah pihak BPP akan menyurat kepada kementerian terkait agar dapat memberikan kebijakan khusus bagi mahasiswa terdaftar yang terancam <i>drop out</i> .	
5.	Audiensi Penyampaian Hasil Pembahasan Permasalahan Mahasiswa FK UNCEN.	19 Juni 2026	Menyampaikan Hasil Pertemuan Pertama dengan Pihak UNCEN	1. Inputan Mahasiswa terkait adanya Praktik Tidak berkenan oleh pihak Dekanat dengan Proses Yudisium 2. Pihak UNCEN Tidak Hadir	
6.	Rapat Pembahasan Proposal Penyelenggaraan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026.	26 Juni 2026	Kita membahas Proposal yang telah di kirimkan dan coba untuk memberikan Reviu Kembali ke Balai Bahasa Prov Papua	Ada beberapa pembiayaan yang perlu konfirmasi	



7.	Rapat Koordinasi Persiapan Kongres Bahasa Daerah bersama Balai Bahasa Provinsi Papua.	29 Juni 2026	Pembahasan Reviu BPP terkait Proposal dan Koordinasi dengan PUSBANGLIN BADAN BAHASA	BPP menyiapkan Skema Panitia Daerah untuk mengerjakan Persiapan dan pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah Ke I Se- Indonesia	
8.	Rapat Koordinasi Persiapan Kongres Bahasa Daerah bersama Balai Bahasa Provinsi Papua.	30 Juni 2026	BPP memaparkan Susunan Panitia Daerah agar segera di tindaklanjuti PUSBANGLIN BADAN BAHASA	Susunan telah dikirimkan ke PUSBANGLIN BADAN BAHASA	



**REKOMENDASI KEGIATAN KELOMPOK KERJA PAPUA CERDAS BPP/BP3OKP PROVINSI
PAPUA PADA BULAN JUNI 2026**

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	Rapat Koordinasi Penempatan Peserta Internship Dokter Wilayah Papua (zoom).	Memperkuat Koordinasi Lintas Sektor untuk mempersiapkan wahana dan Dokter Internship
2.	Rapat Koordinasi bersama Balai Kementerian Sosial mengenai Program Prioritas Tahun 2026.	Badan Pengarah Papua memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Daerah, ATR/BPN, Balai Kementerian Sosial, dan instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian permasalahan lahan serta mendorong pemenuhan tenaga pendidik melalui rekrutmen PPPK yang memberikan prioritas kepada Orang Asli Papua sesuai kebutuhan Sekolah Rakyat.
3.	Pembahasan Lanjutan Permasalahan Akademik Mahasiswa FK UNCEN.	Mempersiapkan Pertemuan dengan Pihak Uncen
4.	Audiensi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Akademik Mahasiswa OAP FK UNCEN Angkatan 2017–2018.	Menyiapkan Koordinasi dengan Pihak Uncen secara teknis untuk menyelesaikan permasalahan
5.	Audiensi Penyampaian Hasil Pembahasan Permasalahan Mahasiswa FK UNCEN.	Menyiapkan Koordinasi dengan Pihak Uncen secara teknis untuk menyelesaikan permasalahan
6.	Rapat Pembahasan Proposal Penyelenggaraan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026.	Memastikan proses Pembiayaan dan Skema Panitia Daerah
7.	Rapat Koordinasi Persiapan Kongres Bahasa Daerah bersama Balai Bahasa Provinsi Papua.	Menyiapkan Skema Panitia Daerah
8.	Rapat Koordinasi Persiapan Kongres Bahasa Daerah bersama Balai Bahasa Provinsi Papua.	Skema Panitia Daerah perlu Legitimasi PUSBANGLIN BADAN BAHASA



KESIMPULAN KESELURUHAN KEGIATAN :

Selama bulan Juni 2026, Kelompok Kerja Papua Cerdas Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP/BP3OKP) telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang berfokus pada penguatan koordinasi lintas sektor di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kebudayaan. Kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan peran aktif BPP sebagai fasilitator dan penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta mitra strategis lainnya dalam mendorong percepatan penyelesaian berbagai isu prioritas di Tanah Papua.

Pada sektor kesehatan, koordinasi penempatan Dokter Internship telah menghasilkan komitmen tindak lanjut dari Kementerian Kesehatan serta penguatan koordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara. Di sektor pendidikan, perhatian utama diberikan terhadap penyelesaian permasalahan akademik mahasiswa Orang Asli Papua Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih melalui serangkaian koordinasi dan audiensi yang diarahkan untuk memperoleh kebijakan afirmatif dari kementerian terkait serta mendorong penyelesaian secara kelembagaan bersama pihak universitas.

Sementara itu, koordinasi dengan Balai Kementerian Sosial terkait Program Sekolah Rakyat menghasilkan kesepahaman mengenai pentingnya percepatan penyelesaian aspek lahan, pemenuhan tenaga pendidik, serta sinergi lintas instansi guna mendukung implementasi program prioritas nasional di Provinsi Papua. Pada bidang kebahasaan dan kebudayaan, rangkaian pembahasan penyelenggaraan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026 telah menghasilkan penyempurnaan proposal, penyusunan skema kepanitiaan daerah, serta langkah awal pembentukan Sekretariat Bersama sebagai bentuk penguatan tata kelola pelaksanaan kongres.

Secara umum, seluruh kegiatan selama bulan Juni 2026 menunjukkan adanya progres koordinasi yang positif, meskipun beberapa agenda masih memerlukan tindak lanjut berupa keputusan dari kementerian, penyelesaian koordinasi teknis dengan instansi terkait, serta penguatan dukungan kelembagaan agar target pelaksanaan program dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

POKJA PAPUA SEHAT



BPP

BADAN PENGARAH PAPUA

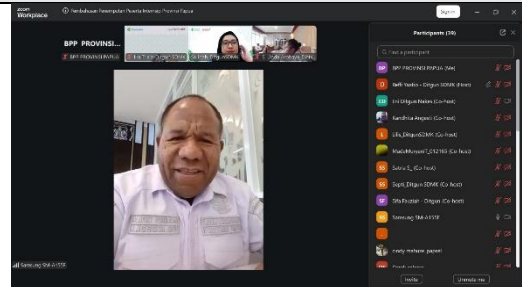
JUNI 2026

Badan Pengarah Papua

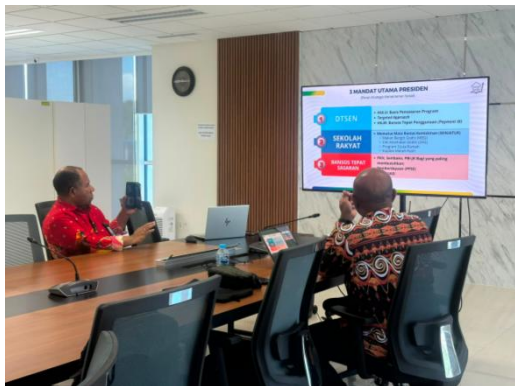
Perwakilan Provinsi Papua



PELAKSANAAN KEGIATAN KELOMPOK KERJA PAPUA SEHAT BPP/BP3OKP PROVINSI PAPUA PADA BULAN JUNI 2026

No	Kegiatan Strategis	Tanggal	Tujuan	Hasil	Dokumentasi
1.	Rapat Koordinasi Penempatan Peserta Internship Dokter Wilayah Papua (zoom).	3 Juni 2026	Melakukan koordinasi penempatan peserta internship dokter di wilayah Papua agar sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga medis.	Disepakati koordinasi lanjutan antara para pihak terkait penempatan peserta internship dokter serta tindak lanjut penyesuaian lokasi berdasarkan kebutuhan layanan kesehatan di Papua.	
2.	Rapat Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Eliminasi Malaria.	12 Juni 2026	Menyusun masukan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka mendukung percepatan eliminasi malaria di wilayah Papua.	Dihimpun masukan dari kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Eliminasi Malaria.	 



3.	Rapat Koordinasi bersama Balai Kementerian Sosial mengenai Program Prioritas Tahun 2026	12 Juni 2026	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program prioritas Kementerian Sosial di Provinsi Papua serta mengidentifikasi peluang dukungan BPP dalam implementasinya.	Kepala Balai Kementerian Sosial memaparkan program prioritas Tahun 2026, antara lain percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, penanganan kedaruratan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Balai juga meminta dukungan Badan Pengarah Papua untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan lahan yang dihadapi dalam pembangunan Sekolah Rakyat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.	
4.	Pembahasan Lanjutan Permasalahan Akademik Mahasiswa FK UNCEN.	15 Juni 2026	Membahas tindak lanjut penyelesaian permasalahan akademik mahasiswa Fakultas Kedokteran UNCEN agar proses pendidikan dapat berjalan sesuai ketentuan.	Diperoleh kesepahaman mengenai langkah penyelesaian permasalahan akademik serta perlunya koordinasi lanjutan dengan pihak universitas dan pemangku kepentingan terkait.	
5.	Audiensi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Akademik Mahasiswa OAP FK UNCEN Angkatan 2017–2018.	18 Juni 2026	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan akademik mahasiswa OAP Fakultas Kedokteran UNCEN Angkatan 2017–2018 melalui koordinasi dengan para pihak terkait.	Disampaikan perkembangan penanganan permasalahan akademik mahasiswa OAP serta disepakati tindak lanjut penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing pihak.	



6.	Audiensi Penyampaian Hasil Pembahasan Permasalahan Mahasiswa FK UNCEN.	19 Juni 2026	Menyampaikan hasil pembahasan dan rekomendasi penyelesaian permasalahan akademik mahasiswa Fakultas Kedokteran UNCEN kepada pihak terkait.	Hasil pembahasan dan rekomendasi telah disampaikan sebagai bahan tindak lanjut dalam penyelesaian permasalahan akademik mahasiswa.	
7.	Forum Konsultasi Publik Tahun 2026.	23 Juni 2026	Menghimpun masukan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan serta program prioritas Tahun 2026.	Terhimpun berbagai masukan dan aspirasi yang akan menjadi bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Papua.	
8.	Rapat Koordinasi Persiapan Kongres Bahasa Daerah bersama Balai Bahasa Provinsi Papua	29 Juni 2026	Melakukan koordinasi persiapan penyelenggaraan Kongres Bahasa Daerah guna mendukung pelestarian dan pengembangan bahasa daerah di Papua.	Disepakati langkah-langkah persiapan pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah, pembagian peran antarinstitusi, serta tindak lanjut koordinasi teknis.	



**REKOMENDASI KEGIATAN KELOMPOK KERJA PAPUA SEHAT BPP/BP3OKP PROVINSI PAPUA
PADA BULAN JUNI 2026**

No	Nama Kegiatan	Rekomendasi
1.	Rapat Koordinasi Penempatan Peserta Internship Dokter Wilayah Papua (zoom)	Perlu dilakukan koordinasi berkelanjutan dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan rumah sakit agar penempatan peserta internship dokter dapat mendukung pemerataan pelayanan kesehatan di Papua.
2.	Rapat Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Eliminasi Malaria.	Perlu mendorong percepatan penetapan Instruksi Presiden tentang Eliminasi Malaria disertai penguatan sinergi lintas sektor dan dukungan pendanaan di wilayah Papua.
3.	Rapat Koordinasi bersama Balai Kementerian Sosial mengenai Program Prioritas Tahun 2026.	Badan Pengarah Papua perlu memfasilitasi koordinasi lintas instansi bersama Pemerintah Daerah, ATR/BPN, Balai Kementerian Sosial, dan pemangku kepentingan terkait guna mempercepat penyelesaian permasalahan lahan sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai rencana.
4.	Pembahasan Lanjutan Permasalahan Akademik Mahasiswa FK UNCEN.	Badan Pengarah Papua perlu memfasilitasi koordinasi antara Universitas Cenderawasih, pemerintah daerah, dan pihak terkait agar penyelesaian permasalahan akademik mahasiswa dapat dilakukan secara cepat dan sesuai ketentuan.
5.	Audiensi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Akademik Mahasiswa OAP FK UNCEN Angkatan 2017–2018.	Perlu dilakukan pendampingan dan monitoring terhadap tindak lanjut penyelesaian permasalahan akademik mahasiswa OAP hingga memperoleh kepastian status akademik.
6.	Audiensi Penyampaian Hasil Pembahasan Permasalahan Mahasiswa FK UNCEN.	Hasil pembahasan perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait dengan penyusunan rencana aksi yang jelas serta monitoring pelaksanaannya.
7.	Forum Konsultasi Publik Tahun 2026.	Masukan dari Forum Konsultasi Publik perlu diakomodasi dalam penyusunan program dan kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua.
8.	Rapat Koordinasi Persiapan Kongres Bahasa Daerah bersama Balai Bahasa Provinsi Papua	Perlu memperkuat koordinasi dengan Balai Bahasa, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk mendukung suksesnya Kongres Bahasa Daerah serta pelestarian bahasa daerah di Papua.



**KESIMPULAN KESELURUHAN KEGIATAN KELOMPOK KERJA PAPUA SEHAT BPP/BP3OKP
PROVINSI PAPUA :**

Selama bulan Juni 2026, Kelompok Kerja Papua Sehat telah melaksanakan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan strategis yang meliputi koordinasi penempatan peserta internship dokter, penyusunan kebijakan percepatan eliminasi malaria, koordinasi program prioritas Kementerian Sosial, fasilitasi penyelesaian permasalahan akademik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, Forum Konsultasi Publik Tahun 2026, serta persiapan penyelenggaraan Kongres Bahasa Daerah.

Secara umum, seluruh kegiatan berjalan dengan baik dan menghasilkan berbagai kesepahaman, rekomendasi, serta tindak lanjut yang memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor. Berbagai isu strategis yang dibahas menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, kementerian/lembaga, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Papua.

Kelompok Kerja Papua Sehat juga terus mengawal isu-isu strategis di bidang kesehatan, antara lain percepatan eliminasi malaria sejalan dengan kebijakan nasional mengenai Percepatan Eliminasi Malaria, pemantauan tindak lanjut terhadap ketersediaan obat-obatan di RSUD di Jayapura guna mencegah terulangnya kekosongan obat di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, serta koordinasi penempatan dokter internship, khususnya lulusan Papua, agar pemerataan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan wilayah dengan keterbatasan akses pelayanan kesehatan dapat berjalan secara optimal.

Badan Pengarah Papua diharapkan terus menjalankan perannya sebagai fasilitator, koordinator, dan penghubung antarinstansi dalam mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas Otonomi Khusus Papua. Selain itu, diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap hasil koordinasi yang telah disepakati agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara efektif, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Papua.



JUNI 2026



KESIMPULAN KESELURUHAN KEGIATAN :

Selama bulan Juni 2026, Anggota Badan Pengarah Papua bersama Kelompok Kerja (Pokja) Papua Produktif, Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Polhukam telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam rangka pelaksanaan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap pelaksanaan program prioritas Otonomi Khusus Papua. Kegiatan tersebut mencerminkan peran aktif Badan Pengarah Papua sebagai fasilitator, koordinator, dan penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan pembangunan di Tanah Papua. Dalam pelaksanaannya, Anggota Badan Pengarah Papua turut memberikan arahan, pendampingan, serta mengawal pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pokja agar tetap selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Pada bidang Papua Produktif, kegiatan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan kawasan persawahan seluas 250 hektare di Distrik Arso, Kabupaten Keerom, percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan koperasi Orang Asli Papua, penguatan kemitraan dengan sektor perbankan, serta pemberdayaan pengusaha jasa konstruksi Orang Asli Papua. Hasil kegiatan menunjukkan adanya komitmen lintas sektor dalam mendukung peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat, penyelesaian aspek legalitas lahan, penguatan akses pembiayaan, dan peningkatan keterlibatan Orang Asli Papua dalam pembangunan ekonomi daerah.

Pada bidang Papua Cerdas, perhatian utama diarahkan pada penyelesaian permasalahan akademik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, penempatan peserta dokter internship di wilayah Papua, serta persiapan penyelenggaraan Kongres Bahasa Daerah Tahun 2026. Berbagai koordinasi yang dilakukan menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua, keberlanjutan pendidikan tinggi, pemerataan tenaga kesehatan, serta pelestarian bahasa dan budaya daerah sebagai bagian dari pembangunan manusia Papua yang berkelanjutan.

Pada bidang Papua Sehat, kegiatan difokuskan pada penyusunan kebijakan percepatan eliminasi malaria, koordinasi program prioritas bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, penghimpunan aspirasi masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Pokja Papua Sehat juga terus mengawal tindak lanjut percepatan eliminasi malaria, pemantauan ketersediaan obat-obatan di rumah sakit, serta pemerataan penempatan tenaga kesehatan, khususnya dokter internship di wilayah Papua, sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.

Pada bidang Papua Polhukam, kegiatan diarahkan pada penyelesaian sengketa tanah ulayat di kawasan Bandara Stevanus Rumbewas dan PT Pertamina Depot Yapen melalui pendekatan koordinatif, verifikasi lapangan, serta fasilitasi dialog antara masyarakat adat, pemerintah daerah, ATR/BPN, aparat penegak hukum, dan pihak perusahaan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta tetap menghormati hak-hak masyarakat adat.

Selain pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Pokja, Anggota Badan Pengarah Papua juga berpartisipasi dalam berbagai forum strategis, termasuk koordinasi Program Sekolah Rakyat bersama Kementerian Sosial, Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua Tahun 2026, serta Pengukuhan dan Pembekalan Kelompok Kerja Rekrutmen Tahun 2026. Anggota Badan Pengarah Papua juga secara aktif melakukan pendampingan, pemantauan, dan pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja guna memastikan seluruh rekomendasi, hasil koordinasi, dan tindak lanjut yang dihasilkan berjalan sesuai arah kebijakan Badan Pengarah Papua dan mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua.



PENUTUP

Demikian Laporan Bulanan Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Anggota Badan Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja) Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua periode Juni 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, sekaligus sebagai bahan informasi, evaluasi, dan koordinasi dalam mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Sekretariat Badan Pengarah Papua pada Sekretariat Wakil Presiden serta para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, menetapkan langkah tindak lanjut, dan memperkuat sinergi lintas sektor terhadap berbagai isu strategis, khususnya di bidang ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua, penyelesaian permasalahan pertanahan, serta penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Badan Pengarah Papua (BPP) akan terus menjalankan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) melalui penguatan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat adat guna memastikan setiap rekomendasi dan program prioritas dapat ditindaklanjuti secara efektif serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.